



**PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
DINAS KESEHATAN**

Jl. Raya Solo No 32 Jiwan Tlp. (0351) 462 728 Fax. 462759

Website : www.dinkes.madiunkab.go.id Email: dinkeskabmadiun@gmail.com

MADIUN 63161

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KESEHATAN

KABUPATEN MADIUN

NOMOR : 188 /72/ 114.2 /2018

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PPID DINAS
KESEHATAN KABUPATEN MADIUN

- MENIMBANG** : a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik, bahwa Pejabat pengelola Informasi dan Dokuemnatasi di setiap Badan Publik wajib melakukan Pengujian tentang Konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17. Selanjutnya Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa pengklasifikasian ditetapkan oleh PPID di setiap Badan Publik berdasarkan Pengujian Konsekuensi secara seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, agar informasi dapat berdaya guna dan berhasil guna, perlu menetapkan informasi publik yang dikecualikan di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun dengan suatu Keputusan Kepala Dinas ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun tentang Penetapan Informasi Publik yang Dikecualikan ;
- MENGINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara ;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan;

5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik ;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik ;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/21/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengaman Informasi
15. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik ;

M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN** :
PERTAMA : Menetapkan Informasi Publik yang Dikecualikan untuk diakses di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, sebagaimana tersebut dalam lampiran.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Madiun
Pada tanggal : Agustus 2023

**KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN MADIUN**

AGUNG TRI WIDODO, SKM, MM.

Pembina Tingkat 1
NIP. 19650330 198803 1 006

NO	JENIS INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI NEGATIF	RELEVANSI/ALASAN	RETENSI WAKTU
1	Proses Penyerapan APBD tahun SKPD dan PPKD	1. UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 2. PP No. 61 Tahun 2010 Pasal 3 3. UU No. 17 Tahun 2003 Pasal 31	Proses pengawasan keuangan oleh Inspektorat dan BPK	Otentik data pengelolaan anggaran	Sampai Laporan Hasil Pemeriksaan BPK dan Opini atas Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah 2-15 oleh BPK dikeluarkan oleh BPK.
2	Proses Penawaran Harga Satuan Lelang Barang dan Jasa	1. UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 2. PP No. 61 Tahun 2010 Pasal 3	Menjaga data penawaran peserta lelang terkait dengan perlindungan persaingan usaha tidak sehat	Persaingan usaha yang sehat	Permanen
3	IP Address Privat	1. UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 2. PP No. 61 Tahun 2010 Pasal 3 3. UU No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE Pasal 30-37 4. PP PSTE No. 82 Tahun 2012 Pasal 7 ayat 1, Pasal 12 ayat 1 (b) 5. Permenkominfo No. 4 Tahun 2016	Menjaga data, arsip dan dokumentasi yang bersifat rahasia terkait dengan hak atas kekayaan intelektual	Keamanan sistem aplikasi dan data	Permanen
4	Data SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana)	1. UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 No. 2 2. PP No. 61 Tahun 2010 Pasal 3 3. UU No. 17 Tahun 2003 Pasal 31 4. Permendagri 13 Tahun 2006	Melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen negara	Perlindungan usaha	permanen
5	Laporan Keuangan yang Belum diaudit oleh BPK	1. UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 2. PP No. 61 Tahun 2010 Pasal 3 3. UU No. 17 Tahun 2003 Pasal 31 4. Permendagri 13 Tahun 2006	1. Melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen negara 2. Menghindari kesalahpahaman terhadap informasi dimata publik	Kelancaran proses pemeriksaan	Sampai laporan hasil pemeriksaan BPK
6	Proses evaluasi pengadaan barang/jasa	1. UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 b 2. PP No. 61 Tahun 2010 Pasal 3	Melindungi pelanggan tetap dapat dipertanggungjawabkan	Perlindungan usaha	Permanen

NO	JENIS INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI NEGATIF	RELEVANSI/ALASAN	RETENSI WAKTU
7	Rincian Informasi Terkait Dokumen Kontrak Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (Nomor rekening perusahaan dan metodologi pelaksanaan) yang terdapat dalam dokumen kontrak pengadaan barang/jasa)	1. UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 2. PP No. 61 Tahun 2010 Pasal 3	1. Melindungi para pihak yang terlibat kontrak 2. Menghindari permasalahan yang bersumber dari pihak yang tidak terkait	Perlindungan usaha	Sampai dengan penandatanganan perjanjian/kontrak Sampai dengan penyerahan berkas
8	Dokumen penawaran pengadaan barang dan jasa	1. UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 b 2. PP No. 61 Tahun 2010 Pasal 3	Melindungi hak atas kekayaan intelektual	Perlindungan usaha	Sampai proses penetapan pemenang dan penandatanganan kontrak kerjasama
9	Data Pribadi bantuan dan data Pribadi Personel Dinas Kesehatan dan jajarannya	1. UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 g dan h 2. PP No. 61 Tahun 2010 Pasal 3	Infomasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan rahasia pribadi orang	Keamanan individu	Sampai memperoleh persetujuan dari orang yang bersangkutan
10.	Daftar user dan password server / aplikasi / perangkat TIK	1. UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 2. PP No. 61 Tahun 2010 Pasal 3 3. UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE Pasal 30-37 4. PP PSTE No. 82 Tahun 2012 Pasal 7 ayat 1 , Pasal 12 ayat 1 (b) 5. Permenkominfo No. 4 Tahun 2016	Melindungi dan mengamankan perangkat data	Keamanan data	
11.	Source Kode Aplikasi Khusus	1. UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 2. PP No. 61 Tahun 2010 Pasal 3 3. UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE Pasal 30-37 4. PP PSTE No. 82 Tahun 2012 Pasal 7 ayat 1 , Pasal 12 ayat 1 (b) 5. Permenkominfo No. 4 Tahun 2016	Melindungi dan mengamankan perangkat data	Keamanan data	Permanen

NO	JENIS INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI NEGATIF	RELEVANSI/ALASAN	RETENSI WAKTU
12.	Hasil Pengujian Keamanan Sistem Informasi	1. UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 2. PP No. 61 Tahun 2010 Pasal 3 3. PP PSTE No. 82 Tahun 2012 Pasal 7 ayat 1 , Pasal 12 ayat 1 (b) 4. Permenkominfo No. 4 Tahun 2016	Melindungi dan mengamankan perangkat data	Keamanan sistem informasi dan data	Permanen
13.	Hasil Audit keamanan Informasi	1. UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 2. PP No. 61 Tahun 2010 Pasal 3 3. PP PSTE No. 82 Tahun 2012 Pasal 7 ayat 1 , Pasal 12 ayat 1 (b) 4. Permenkominfo No. 4 Tahun 2016	Melindungi dan mengamankan perangkat data	Keamanan sistem informasi dan data	Permanen
14.	Sistem persandian meliputi surat masuk dan surat keluar yang berkualifikasi sandi, data jumlah dan informasi tentang material sandi metode dan teknik aplikasi	1. UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 2. PP No. 61 Tahun 2010 Pasal 3	Melindungi kebocoran Informasi	Keamanan data strategis	Permanen
15.	Persandian, kegiatan pencarian dan pengupasan informasi bersandi, aktifitas informasi bersandi, dan jaringan komunikasi bersandi	1. UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 2. PP No. 61 Tahun 2010 Pasal 3	Melindungi kebocoran Informasi	Keamanan data strategis	Permanen
16.	Catatan Medis/Rekam Medis	1. UU No 14 Thn 2008 Ttg KIP Pasal 17 g,h 2. Permenkes RI No 269/Menkes/Per/III/2008	1. Menyangkut masalah privacy 2. Kemungkinan Penyalahgunaan informasi	1. Untuk kepentingan kesehatan pasien 2. Relevan, Kepentingan penyediaan pihak yang berwajib	Permanen

NO	JENIS INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI NEGATIF	RELEVANSI/ALASAN	RETENSI WAKTU
17.	Bio Data Kependudukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No 14 Thn 2008 Ttg KIP Pasal 17 g,h 2. UU No 23 Thn 2006 ttg administrasi kependudukan psl 85 ayat 3 3. UU No 24 thn 2014 ttg perubahan atas UU no 23 thn 2006 ttg adminitrasi kependudukan pasal 84 ayat 1 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Privacy 2. Kemungkinan penyalahgunaan informasi 	Melindungi perserorangan	Permanen
18.	Data Pegawai ASN	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No 14 thn 2008 ttg KIP pasal 17 huruf g dan h 2. UU No 5 Thn 2014 ttg ASN Pasal 127 3. UU 25 Tahun 2014 Pasal 128 	Menjamin efisiensi dan efektifitas dan akurasi pengambilan keputusan dalam manajemen ASN	Efektivitas dan akurasi data ASN	Selama masih berlaku
19.	Pengadaan Barang dan Jasa	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU no 14 thn 2008 ttg KIP Pasl 17 huruf b dan j 2. KUH Perdata , pasal 1338 jo Perpres No. 54 Thn 2010 ttg pengadaan barang dan jasa Pemerintah pasl 35 huruf b 	Persaingan Usaha yang tidak sehat / competitor		Sampai ditetapkan pemenang lelang dan diumumkan
20.	Dokumen LHKPN	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No 14 thn 2008 ttg KIP pasal 17 huruf j 2. UU no 8 Thn 1981 TtgHukum Acara Pidana pasal 322 3. UU No 43 Thn 2009 Ttg Kearsiapan pasal 44 4. Keputusan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi No. Kep.07/KPK/02/2005 Tata cara pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengganggu kenyamanan Privacy 2. Timbulnya penyimpangan 	Relevan, kecuali untuk kepentingan penegakan hukum Menjaga keakuratan data pemeriksaan Selama dalam proses lelang /pengadaan sebelum diumumkan Mencegah terjadinya tindak korupsi atau penyalahgunaan wewenang	Sampai LHKPN ditetapkan

NO	JENIS INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI NEGATIF	RELEVANSI/ALASAN	RETENSI WAKTU
21.	Data Pengaduan Masyarakat, Laporan Hasil Pemeriksaan Pengaduan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf j : Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU 2. UU No 14 Tahun 2008 Ttg KIP pasal 6 3. UU No 13 Thn 2006 Ttg Perlindungan Saksi dan Korban 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manyangkut Privacy 2. Mengganggu Proses penyelidikan/pengawasan 	Menjaga kelangsungan proses hukum	Sampai ada keputusan hasil pengaduan

Madiun, Agustus 2023

**KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN MADIUN**

AGUNG TRI WIDODO, SKM, MM.

Pembina Tingkat 1

NIP. 19650330 198803 1 006